



LAPORAN KINERJA KPKNL YOGYAKARTA TAHUN 2022



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
Peran Strategis	5
Sistematika Laporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
Rencana Strategis	7
Perjanjian Kinerja	10
Evaluasi Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
Capaian Kinerja Organisasi	16
Kinerja Lainnya	42
Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	
KALENDER PERISTIWA	

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara (KPKNL) Yogyakarta pada tahun 2022 serta penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dapat terlaksana dengan baik meski dalam kondisi pandemi covid-19.



Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Selama tahun 2022, KPKNL Yogyakarta telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja KPKNL Yogyakarta Tahun 2022 yang terdiri dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2022 dengan target kontrak kinerja tahun 2022, serta pencapaian beberapa kinerja lainnya.

Semoga Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta ini dapat memberikan gambaran atas kekuatan, kelemahan, peluang, serta hambatan yang dihadapi selama tahun 2022 dan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada para pemangku kepentingan serta menjadi pendorong peningkatan kinerja KPKNL Yogyakarta.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran pejabat dan staf KPKNL Yogyakarta yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita.

Kepala KPKNL Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik
Jati Wiryawan



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Tahun 2022 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Yogyakarta selama tahun 2022 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban KPKNL Yogyakarta atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja KPKNL Yogyakarta, menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja KPKNL Yogyakarta selama tahun 2022.

Visi KPKNL Yogyakarta selaras dengan visi DJKN adalah Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPKNL Yogyakarta mempunyai lima misi yaitu (1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum (3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; (5) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk menunjang pencapaian visi dan misi tersebut, disusunlah Peta Strategi KPKNL Yogyakarta tahun 2022 berdasarkan metodologi *balanced score card* yang terdiri dari empat perspektif yaitu, *Stakeholder*, *Customer*, *internal process* dan *learning and growth*. Peta Strategi tersebut terdiri dari sebelas sasaran strategi. Sasaran strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif
7. Edukasi yang efektif
8. Pengawasan dan pengendalian yang efektif
9. SDM yang kompeten
10. Organisasi yang *fit for purpose*
11. Pengelolaan keuangan yang optimal.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kriteria IKU didasarkan pada criteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continuously Improved*). Pada tahun 2022 ini terdapat 19 (Sembilan belas) IKU pada level eselon III yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPKNL Yogyakarta dengan Kepala Kanwil DJKN Jateng dan D.I. Yogyakarta.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2022 sudah sesuai target yang ditetapkan. Pencapaian IKU KPKNL Yogyakarta terdiri dari 17 IKU berstatus hijau, dan 2 IKU berstatus kuning dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 114,98%.

Selain melaksanakan pengukuran kinerja, dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja telah dilaksanakan reviu terhadap kontrak kinerja. Reviu meliputi dokumen dan informasi pendukung penyusunan kontrak kinerja seperti kontrak kinerja tahun sebelumnya, Manual IKU dan *Matriks Cascading*.

Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Capaian IKU yang masih di bawah target terus dilakukan evaluasi dan *action plan* yang relevan. Koordinasi yang intensif dengan *stakeholder* terkait terus dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU yang memiliki eksternalitas yang tinggi. Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan bahwa pengelolaan kinerja tidak hanya menitikberatkan pada hasil capaian semata, tetapi turut memperhatikan kualitas IKU tersebut. Penyelarasan kontrak kinerja dengan Rencana Strategis DJKN tahun 2020-2024, dokumen rencana kerja, dan RKAKL serta pengelolaan manajemen risiko diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi KPKNL Yogyakarta sehingga mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi (*high performance organization*), adaptif terhadap kebutuhan *stakeholder* dan pimpinan serta tentunya tetap menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Yogyakarta dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

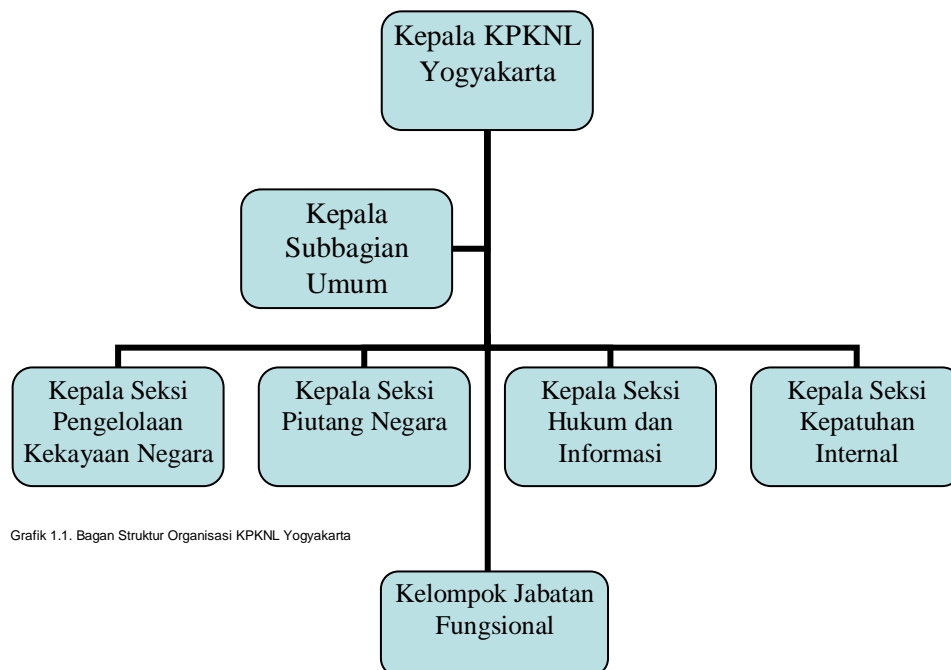
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara,

penilaian, dan lelang. Dalam pelaksanaan tugas tersebut KPKNL menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Yogyakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Adapun wilayah kerja KPKNL Yogyakarta meliputi: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo.

KPKNL Yogyakarta untuk tahun anggaran 2022 memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Grafik 1.1. Bagan Struktur Organisasi KPKNL Yogyakarta

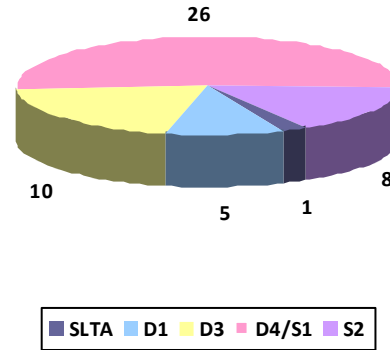
Adapun tugas masing-masing seksi/subbagian di atas adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.
3. Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
4. Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, Jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
5. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Yogyakarta didukung oleh 50 (lima puluh) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, gender, dan umur berdasarkan data per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

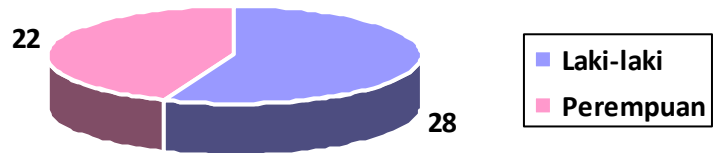
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SLTA	1
D1	5
D3	10
D4/S1	26
S2	8
Total	50



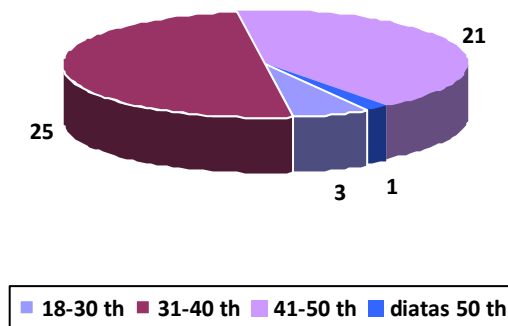
Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Perempuan	22
Laki-laki	28
Total	50



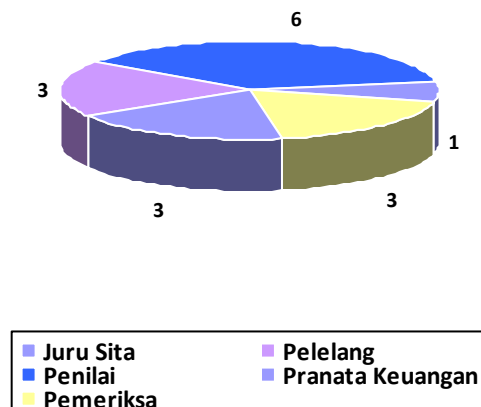
Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur dan Golongan

KELOMPOK UMUR	JUMLAH
18-30	3
31-40	25
41-50	21
Diatas 50	1
Total	50



Tabel 1.4
Tenaga Fungsional KPKNL YOGYAKARTA

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Juru Sita	3
2	Pelelang	3
3	Penilai	6
4	Pranata Keuangan APBN	1
5	Pemeriksa	3
	Total	16



Peran Strategis

Sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, KPKNL Yogyakarta diberi tanggung jawab sebagai unit yang melayani dengan peran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan PNBPN dari pengelolaan BMN, Piutang, dan Lelang, melakukan evaluasi kinerja BMN, serta mewujudkan implementasi layanan berbasis digital.
2. Mewujudkan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter melalui peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing melalui pengembangan kompetensi pegawai.
4. Mewujudkan penguatan sistem anti korupsi melalui birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.
5. Mendukung program pemberdayaan dan peningkatan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.
6. Ikut berperan dalam percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sarana yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatif.

2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, peran strategis, dan sistematika laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi, kinerja lainnya, dan realisasi anggaran.

5. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, KPKNL Yogyakarta merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan cara pencapaiannya melalui tahapan kegiatan berupa penetapan kebijakan dan penyusunan program.

Dokumen Rencana Strategis KPKNL Yogyakarta menjadi pedoman bagi KPKNL Yogyakarta untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja. KPKNL Yogyakarta berusaha memberikan pelayanan di pengelolaan barang milik negara, penilaian, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan visi DJKN, yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 6 (enam) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;

6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Yogyakarta untuk periode 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan Penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik KPKNL Yogyakarta yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Yogyakarta mempunyai strategi yang akan dijalankan. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Sesuai Renstra tahun 2020-2024, strategi KPKNL Yogyakarta yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial.

Pengelolaan aset negara memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung dan membangun pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu KPKNL Yogyakarta turut berkontribusi dan berupaya untuk mengoptimalkan peran tersebut, sehingga aset negara tidak lagi dipandang sebagai sumber daya pasif, namun secara produktif dapat dikelola dan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Meningkatkan penerimaan PNBPN dari hasil pengelolaan Aset melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, PNBPN lelang dan PNBPN pengurusan piutang.
- b. Penggunaan BMN sesuai standar SBSK.
- c. Memastikan aset yang dikelola oleh KPKNL Yogyakarta telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (*the highest and best use principle*).
- d. Pemutakhiran data piutang negara.
- e. Optimalisasi pengurusan piutang negara.
- f. Implementasi evaluasi kinerja BMN berupa tanah dan bangunan (Portofolio Aset Negara).

2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan ini adalah Pengelolaan lelang yang optimal. Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah :

- a. Pelaksanaan *e-Auction* yang mengakomodasi prinsip-prinsip *e-commerce*.
- b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan ini adalah penilaian yang berkualitas. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- a. Pengukuran deviasi ketergunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan
- b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

4. Birokrasi dan layanan publik KPKNL Yogyakarta yang *agile*, efektif, dan efisien.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan arah kebijakan ini adalah: organisasi dan SDM yang optimal, sistem informasi yang andal dan terintegrasi, pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah serta komunikasi publik yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah :

- a. Pemenuhan unit kerja dengan kriteria ZI menuju WBK/WBBM
- b. Mengembangkan kompetensi pegawai
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Implementasi transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan *IT-Based Service* Kekayaan Negara
- b. Mewujudkan basis data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan

Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah penguatan unit kepatuhan internal di KPKNL Yogyakarta.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai komunikasi publik yang efektif adalah peningkatan kapabilitas dan tata kelola kehumasan pada KPKNL Yogyakarta.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Yogyakarta harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Yogyakarta. Sasaran Strategis KPKNL Yogyakarta tahun 2022 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Yogyakarta 2022 memuat 11 sasaran strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian, (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, (3) Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi, (4) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal, (5) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional, (6) Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif, (7) Edukasi yang Efektif, (8) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif, (9) SDM yang Kompeten, (10) Organisasi yang Fit For Purpose, dan (11) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal. Peta Strategi KPKNL Yogyakarta tersaji dalam gambar 2.1. berikut.

Gambar 2.1 Peta Strategi KPKNL Yogyakarta



Peta Strategi KPKNL Yogyakarta menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Dari peta strategi KPKNL Yogyakarta Tahun 2022 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Yogyakarta mencapai 11 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang diidentifikasi sebanyak 19 IKU. Keterkaitan antara sasaran strategi dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan IKU

Sasaran Strategis 1
Pengelolaan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang	%	100
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	%	36

Sasaran Strategis 2
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	%	100
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	%	100

Sasaran Strategis 3
Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	Indeks	4.35

Sasaran Strategis 4

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	%	62
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	%	100
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	%	100
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	100

Sasaran Strategis 5

Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	%	19

Sasaran Strategis 6

Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-auction dan E-conventional Auction	%	92
6b-CP	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	%	10

Sasaran Strategis 7

Edukasi yang Efektif

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
7a-N	Tingkat Efektivita Edukasi dan Komunikasi	Indeks	90

Sasaran Strategis 8

Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	%	85

Sasaran Strategis 9
SDM yang Kompeten

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	%	100

Sasaran Strategis 10
Organisasi yang *Fit For Purpose*

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	Indeks	80
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	Indeks	90

Sasaran Strategis 11
Pengelolaan Keuangan yang Optimal

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	95.5
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	%	100

Evaluasi Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja KPKNL Yogyakarta tahun 2022, KPKNL Yogyakarta berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor:467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Polarisas IKU *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah /kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. Target IKU menantang namun tetap realistis, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*
Indeks Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Target

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

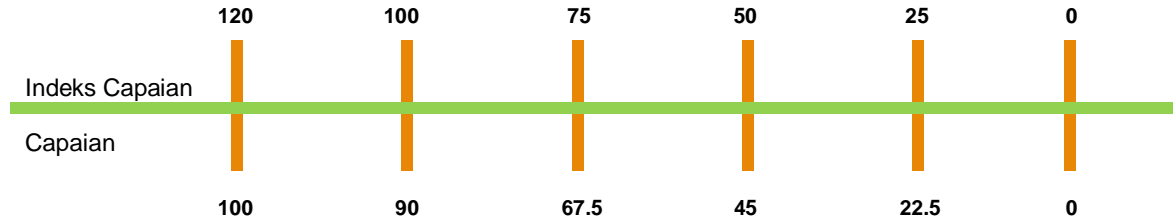
2. Perhitungan untuk indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*
Indeks Capaian = $[1+(1-\text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*.

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

Grafik:



I_n = Indeks capaian

I_{n-1} = Indeks capaian di bawahnya

I_{n+1} = Indeks capaian di atasnya

C_a = Capaian awal

C_a = Realisasi/target x100%

C_n = Capaian dengan ketentuan :

a. Apabila Realisasi > target, maka:

$$C_n = 100 - (C_a - 100), \text{ dimana cara maksimum adalah } 200\%$$

b. Apabila Realisasi < Target, maka :

$$C_n = C_a$$

C_{n-1} = Capaian di bawahnya

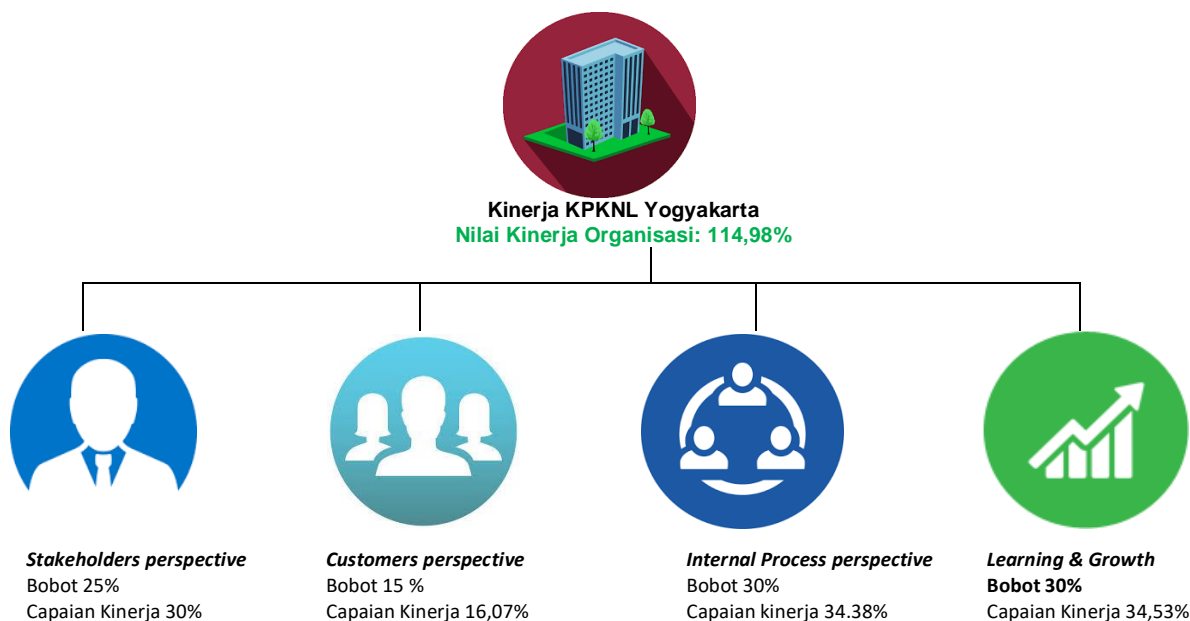
C_{n+1} = Capaian di atasnya

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapakan capaian dalam rentang tertentu disekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

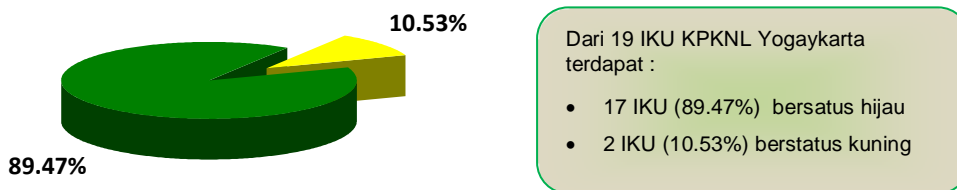
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Yogyakarta adalah sebesar **114,98**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut.



Selama tahun 2022, KPKNL Yogyakarta memiliki capaian 17 IKU berstatus hijau, 2 IKU berstatus kuning. Indeks capaian tertuang dalam grafik 3.1 berikut.

Gafik 3.1



Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian

Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL mengidentifikasi dua IKU, yang capaiannya dapat dilihat pada dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100% Rp15,24M	177,72% Rp25,09 M	177,72%
2	Persentase Produktivitas Lelang	36%	57,14%	158,73%

a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada KPKNL berasal dari:

a. PNBP Kekayaan Negara (PNBP BMN)

Penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

b. PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

c. PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- a) Bea lelang,
- b) Bea lelang pegadaian,
- c) Denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,
- d) Biaya permohonan lelang,
- e) Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi,

f) Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

PNBP dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang diterima KPKNL Yogyakarta pada tahun 2022 sebesar Rp27.092.400.680,00, terdiri dari:

- a. PNBP pengelolaan BMN sebesar Rp22.241.131.203,00
- b. PNBP pelaksanaan lelang sebesar Rp4.824.054.016,00
- c. PNBP pengurusan piutang negara sebesar Rp27.215.461,00

Kendala yang dihadapi:

1. Penagihan langsung yang dilakukan bersamaan dengan penyampaian Surat Paksa akan efektif mendorong peningkatan angsuran hutang, namun dengan kondisi pandemi Covid-19 ini apabila melakukan penagihan dan penyampaian Surat Paksa akan terbentur dengan norma etika dan kepatutan.
2. Penurunan pemanfaatan BMN berupa akibat adanya pandemi Covid-19.
3. Potensi pemanfaatan pada satker masih cukup besar tetapi belum tergalai secara optimal (persetujuan pemanfaatan sudah terbit tapi belum ditindaklanjuti/belum terbit perjanjian dan potensi KSP banyak tapi belum diajukan)
4. PNBP yang masuk selama ini lebih besar dari pemindahtanganan, sementara pemanfaatan hanya dari sewa kantin, ATM yang nilainya relatif kecil.
5. Tingginya Lelang yang TAP disebabkan nilai limit lelang HT terlalu tinggi, objek lelang masih berpenghuni sehingga berpotensi risiko pasca lelang.
6. Terjadinya lelang wanprestasi menghilangkan potensi pencapaian bea lelang.

Tindakan yang telah dilakukan antara lain:

1. Menghimpun data PNBP yang disetorkan oleh bendahara penerimaan.
2. Menghimpun data penerimaan PNBP dari KPPN.
3. Menghimbau satker agar mengoptimalkan asetnya melalui pemanfaatan BMN.
4. Penagihan Piutang Negara.
5. Sosialisasi *crash program* Piutang Negara.
6. Menghimbau *stakeholder* agar mengajukan permohonan lelang online.
7. Melakukan penggalan potensi lelang.
8. Melakukan penagihan langsung dan penyampaian Surat Paksa.
9. Memproses BKPN penyerahan baru sampai dengan tahap panggilan.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian penerimaan negara bukan pajak pada tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan edukasi dan komunikasi secara digital
2. Meningkatkan penggalan potensi lelang

3. Penagihan Piutang Negara dan penyampaian surat himbauan penyelesaian hutang baik melalui *Crash Program* maupun tidak
4. Meningkatkan publikasi lelang.go.id

Berikut perbandingan target dan realisasi PNBP dari pengelolaan kekayaan negara tahun 2019 s.d. 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan target dan realisasi PNBP dari pengelolaan kekayaan negara

2019		2020		2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	82,87%	100%	85,98%	100%	111,15%	100%	177,72%
68.81 M	130.52 M	18.12 M	15.57 M	15.76 M	17.52	15.24 M	27.09 M

b. Persentase Produktivitas Lelang

Produktifitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Untuk tahun 2022, target produktivitas lelang pada KPKNL Yogyakarta adalah 36% dari jumlah total frekuensi lelang.

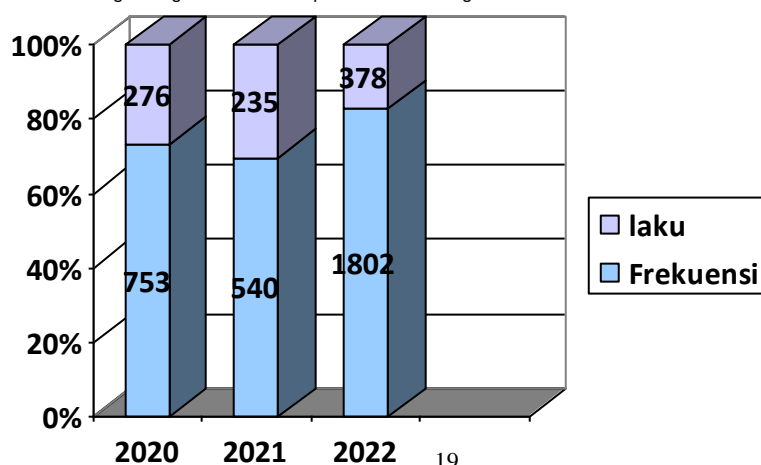
Capaian produktivitas tahun 2022 adalah sebesar 57,14%. Dari 1.372 lot lelang dengan jumlah pelaksanaan lelang laku sebanyak 784 lot lelang, sebagaimana terlihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3. Capaian IKU Produktifitas lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Produktifitas lelang :	36%	57,14%	158,73%
Jumlah Frekuensi lelang Laku		378	
Jumlah Frekuensi lelang secara keseluruhan		1.802	

Berikut grafik perbandingan target dan realisasi produktivitas lelang dari tahun 2020-2022.

Grafik. 3.2 Perbandingan target dan realisasi produktivitas lelang tahun 2020 s.d. 2022



Penerapan layanan permohonan *online* dan *e-Auction* menjadi alternatif dalam situasi wabah pandemi ini. Pencapaian IKU ini berimplikasi pada pelayanan lelang melalui permohonan online dan *e-auction* memudahkan masyarakat luas untuk mengakses lelang, sehingga diharapkan animo masyarakat terhadap lelang tetap dan bahkan dapat meningkat. Hal ini dapat mendorong hasil lelang lebih optimal, sehingga target produktivitas lelang dapat tercapai. Namun pada pelaksanaan lelang tahun 2022, lelang batal dan lelang TAP masih cukup tinggi sehingga berimplikasi pada tingkat produktivitas lelang.

Tindakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU KPKNL Yogyakarta Penggalan potensi lelang dan berkoordinasi dengan *stakeholder* agar mengajukan lelang prioritas laku dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan permohonan lelang BMD.

Action plan selanjutnya akan terus mengoptimalkan koordinasi pengguna jasa lelang terkait penggalan potensi lelang dan melaksanakan lelang sesuai dengan Perdirjen No.5/KN/2020.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi 2 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Hasil Lelang	100% Rp180.000.000.000	93,56% Rp168.410.792.806	93,56%
2	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100% Rp1.250.000.000	263,71% Rp3.296.325.170	263,71%

a. Persentase Hasil Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau

harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan lelang pegadaian dalam periode tertentu.

Adapun realisasi pokok lelang s.d. triwulan IV 2022 sebesar Rp168.410.792.806,- dari target tahunan Rp 180.000.000.000,- (93,56%).

Kinerja Lelang terdampak secara signifikan karena adanya kebijakan Pemerintah dalam mencegah wabah pandemi Covid-19 sehingga capaian hasil lelangnya belum optimal. Selain itu, ketidaktercapaian target hasil lelang tahun 2022 disebabkan oleh beberapa permasalahan di antaranya : (1) menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga lelang TAP semakin tinggi, (2) banyak permohonan pembatalan lelang dari penjual maupun dibatalkan oleh PL sangat mempengaruhi pencapaian pokok maupun PNBPN lelang, (3) banyaknya lelang wanprestasi mempengaruhi hilangnya potensi pokok lelang, (4) besaran pokok lelang yang diajukan relatif tidak signifikan dibandingkan dengan target lelang sehingga belum dapat mendongkrak capaian.

Capaian IKU Persentase hasil lelang ditabulasikan dalam tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5 Capaian IKU persentase pokok lelang

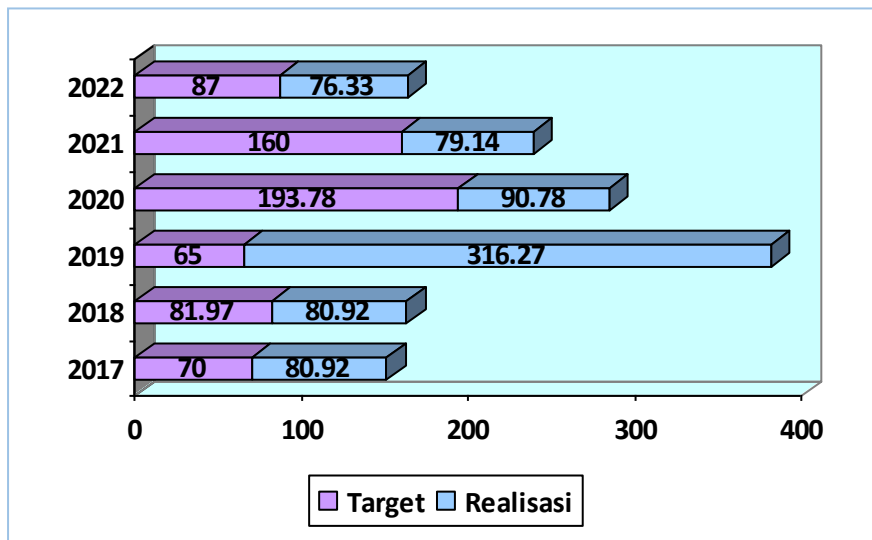
Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1.	Pokok Lelang PL I	87.000.000.000	76.330.174.679	93,56%
2.	Pokok Lelang Pegadaian	93.000.000.000	92.080.618.127	
Total		180.000.000.000	168.410.792.806	

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi pokok lelang:

Tabel 3.6 Perbandingan target dan realisasi Pokok lelang tahun 2021-2022

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pokok lelang PL I	100% Rp160.000.000.000	49.46% Rp79.136.025.942	100% Rp87.000.000.000	87,74% Rp76.330.174.679
Pokok Lelang Pegadaian	100% Rp92.000.000.000	137.08% Rp126.118.594.200	100% Rp93.000.000.000	99,01% Rp92.080.618.127
Total	100% Rp252.000.000.000	81.45% Rp205.254.620.142	100% Rp180.000.000.000	93,56% Rp168.410.792.806

Grafik 3.3 Perbandingan target dan realisasi Pokok lelang PL I Tahun 2017 s.d. 2022 (dalam Miliar Rupiah)



Meskipun capaian IKU persentase hasil lelang tahun 2022 tidak mencapai target, KPKNL Yogyakarta telah berusaha dengan melakukan berbagai tindakan untuk mewujudkan target pokok lelang tersebut melalui penggalian potensi lelang, meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder*, menghimbau pengajuan lelang dengan prioritas laku, sosialisasi lelang kepada *stakeholder* serta koordinasi dengan perum pegadaian, mengadakan layanan konsultasi virtual. Kegiatan tersebut tetap akan dilaksanakan sebagai rencana aksi di tahun 2023.

b. Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

1. Angsuran
2. Pelunasan
3. Penarikan/ Pengembalian
4. Pelunasan
5. PSBDT

6. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2021.

Dengan keterbatasan kondisi akibat dampak pandemi covid-19, pemerintah hadir memberikan stimulus dan dukungan pemulihan ekonomi nasional dengan meluncurkan program keringanan utang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi dengan Mekanisme Crash Program merupakan perwujudan dari amanah Undang-Undang No. 9 Tahun 2020.

KPKNL Yogyakarta telah berhasil mengimplementasikan program keringanan hutang sehingga percepatan penyelesaian outstanding piutang negara per 31 Desember 2017 yang dikelola tahun 2022 dapat melampaui target.

Sampai dengan akhir tahun 2022 KPKNL Yogyakarta berhasil menyelesaikan outstanding piutang negara dengan kriteria berkas per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.296.325.170 (263,71%), sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Perbandingan target dan realisasi tingkat penurunan outstanding piutang negara tahun 2021-2022

2021			2022		
Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Rp3,75 M	Rp5,31 M	141.57%	Rp1,25 M	Rp3,29 M	263,71%

3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL mengidentifikasi satu IKU yaitu Indeks kepuasan pengguna layanan pada KPKNL, yang capaiannya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8. Capaian IKU pada Sasaran Strategis Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

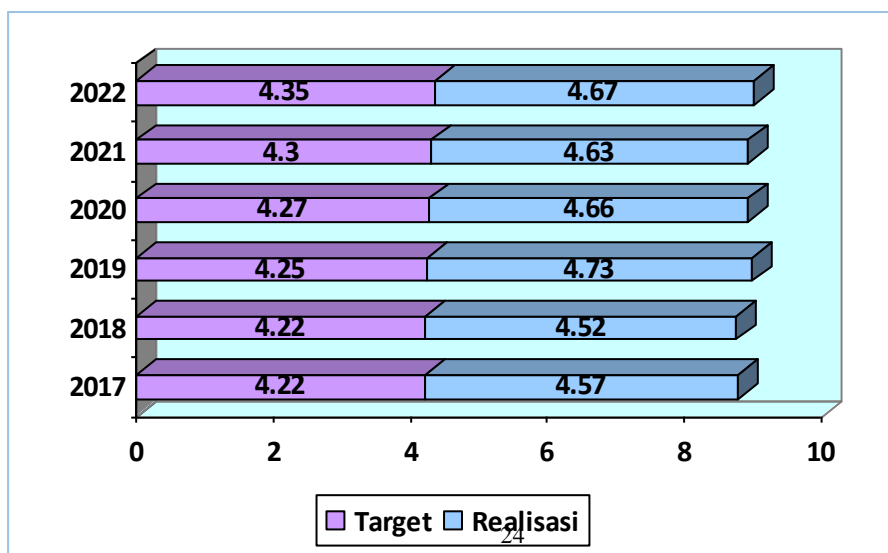
Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks kepuasan pengguna layanan	4.35	4.67	107,36%

a. Kepuasan Pengguna Layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra KPKNL Yogyakarta

IKU ini mengukur kualitas layanan KPKNL Yogyakarta dilihat dari perspektif pengguna layanan. Berdasarkan survey tahun 2022, hasil yang diperoleh telah melampaui target dan kualitas layanan KPKNL Yogyakarta masuk dalam kategori sangat memuaskan. Target pada tahun 2022 sebesar 4,35 dan realisasinya sebesar 4,67. Berikut ini adalah grafik perbandingan antara target dan realisasi tahun 2017 s.d. 2022.

Grafik. 3.4. Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan tahun 2017 s.d. 2022



Adapun tindakan yang telah dilakukan KPKNL Yogyakarta dalam rangka mewujudkan kepuasan *stakeholder* di antaranya adalah meningkatkan efektivitas koordinasi dan bersinergi dengan *stakeholder*, meningkatkan kualitas dan mempercepat penyelesaian layanan, melakukan sosialisasi dalam berbagai media serta mengupdate pemberitaan kegiatan KPKNL melalui media sosial. Rencana aksi selanjutnya di tahun 2023 KPKNL Yogyakarta akan terus meningkatkan efektivitas dan koordinasi dengan *stakeholder* serta meningkatkan edukasi kepada pengguna layanan.

4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektivitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut di antaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian..

Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi empat IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.9.

Tabel 3.9 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan SBSK	62%	74,39%	119,98%
2	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	100% 508	126,57% 643	126,57%
3	Persentase Penyelesaian BKPN	100% 156	137,18% 214	137,18%
4	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	112,08%	112,08%

a. Persentase Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun Perencanaan Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

IKU ini menghitung penggunaan BMN yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan aset negara termasuk *existing* luasan BMN satuan kerja. Target kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah sebesar 62%. Adapun realisasi IKU sebesar 74,39% dengan nilai capaian sebesar 119,98%.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah dengan : (1) melakukan pengukuran atas kuantitas terlebih dahulu ; (2) Melakukan kunjungan lapangan, (3) Survei lapangan.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan di periode berikutnya antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan satker, melakukan penelitian lapangan, pendataan serta koordinasi yang lebih efektif dengan satker, seluruh data yang diperlukan dapat tersedia dengan lengkap dan tepat waktu sehingga seluruh *form* SBSK yang masuk telah selesai ditindaklanjuti.

b. Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertifikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak.

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- 1) Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
- 2) Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
- 3) Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
- 4) K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
- 5) Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan
- 6) Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2022 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN

Pada tahun 2022, realisasi IKU ini adalah 643 bidang (126,57%) dari target 508 bidang (100%) sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Yogyakarta.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2019 s.d. 2022:

Tabel 3.10. Perbandingan target dan realisasi bidang tanah BMN yang disertifikatkan tahun 2019-2022

2019		2020		2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100% 123 bidang	101,63% 125 bidang	100% 93 bidang	111.83% 104 bidang	100% 551 bidang	100.54% 554 bidang	100% 508 bidang	126,57% 643 bidang

Tindakan yang sudah dilakukan KPKNL mencapai target sertifikasi tahun 2022 adalah melalui rapat koordinasi sertifikasi (Kanwil DJKN Jateng dan DIY, Kanwil BPN, Kantor pertanahan, satker target Sertifikasi), melakukan indentifikasi, dan verifikasi serta *one on one meeting*.

Action plan berikutnya adalah akan melakukan koordinasi dengan kantor pertanahan dan satker target sertifikasi untuk pelaksanaan IKU tahun 2023.

c. Persentase Penyelesaian BKPN

Penyelesaian *outstanding* piutang negara dipercepat dengan memprioritaskan penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN. IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas
2. BKPN Penarikan
3. BKPN dikembalikan, dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Pada tahun 2022, realisasi IKU ini adalah sebesar 137,18% (214 BKPN) dari target 100% (156 BKPN) pada perjanjian kinerja KPKNL Yogyakarta.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d. 2022:

Tabel 3.11. Perbandingan target dan realisasi bidang tanah BMN yang disertifikatkan tahun 2020-2022

2020		2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100% 1014	100,64% 1020	100% 919	103,37% 950	100% 156	137,18% 214

Action plan berikutnya adalah memanggil debitur yang memenuhi syarat *Crash Program*, melaksanakan crash program, dan melaksanakan PSBDT.

d. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara.

Di tengah-tengah situasi pandemi covid-19, KPKNL Yogyakarta berhasil mencapai target portofolio aset yang ditetapkan tahun 2022 melalui upaya menghimbau satker menyiapkan data-data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja BMN, melaksanakan penelitian lapangan, pengumpulan data, observasi dan wawancara.

Pada tahun 2022, realisasi IKU ini adalah evaluasi kinerja sebesar 71 NUP dengan realisasi sebanyak 87 NUP dan penyampaian rekomendasi sebesar 987 NUP dengan realisasi 1.003 NUP.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) tahun 2020 s.d. 2022:

Tabel 3.12. Perbandingan target dan realisasi Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) tahun 2020-2022

2020		2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100% 294 NUP	100% 294 NUP	100% 518 NUP	120.08% 622 NUP	100% 71	122,54% 87

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian

Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi satu IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.13.

Tabel 3.13 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	0%	200%

a. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi BMN.

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Tujuan strategis dari IKU ini adalah Mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN. Tahun 2022 deviasi ketergunaan hasil penilaian pada KPKNL Yogyakarta adalah 0% dari target 19%, artinya nilai aset wajar yang dihasilkan oleh penilai DJKN pada KPKNL Yogyakarta telah sesuai/mendekati pasar. Berikut ini perbandingan target dan realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian tahun 2020-2022:

Tabel 3.14 Perbandingan target dan realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian tahun 2020-2022

2020		2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
30%	1.81%	22%	0,26%	19%	0%

Tindakan yang dilakukan KPKNL Yogyakarta untuk mencapai ini di antaranya melakukan uji kendali mutu hasil penilaian dengan pelaksanaan peer review secara rutin, membangun koordinasi yang efektif dengan *stakeholder* dalam rangka penyelesaian penilaian aset. Sedangkan rencana aksi tahun 2023 yang

akan lakukan adalah menyelesaikan seluruh permohonan penilaian yang masuk serta terus memastikan kualitas hasil penilaian melalui *peer review*.

6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektivitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut di antaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi dua IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.15.

Tabel 3.15 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional Auction	92%	100%	108,7%
2	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%	0,46%	195,45%

a. Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional Auction

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. *E-auction* ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih *real time* dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi *e-auction* meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*)

Target capaian *e-Auction* dan *e-Conventional Auction* adalah sebesar 92% dari realisasi frekuensi lelang, dengan catatan target *e-Auction* adalah minimal sebesar 80% dari realisasi frekuensi lelang.

Capaian *e-Auction* dan *e-Conventional Auction* tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target 92%, artinya implementasi *e-Auction* pada KPKNL Yogyakarta berjalan baik dan lancar. Frekuensi lelang sampai dengan triwulan IV 2022 sebanyak 1.002 pelaksanaan lelang atau 1.372 lot lelang. Keseluruhan lelang tersebut dilaksanakan melalui *e-Auction*. Untuk selanjutnya penerapan *e-auction* akan terus dijalankan untuk memudahkan masyarakat luas untuk mengakses lelang, sehingga diharapkan animo masyarakat terhadap lelang tetap dan bahkan dapat meningkat.

Berikut perbandingan target dan realisasi pelaksanaan e-auction dan e-conventional auction tahun 2018-2022.

Tabel 3.16. Perbandingan target dan realisasi IKU pelaksanaan e-auction dan e-conventional auction tahun 2018 s.d. 2022

2018		2019		2020		2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
85%	98.08% 561 frek	90%	98.50% 724 frek	90%	100% 753 frek	92%	98.89% 534 frek	92%	100% 1.002 frek
Jumlah Frekuensi lelang 572x		Jumlah Frekuensi lelang 735x		Jumlah Frekuensi lelang 753x		Jumlah Frekuensi lelang 540x		Jumlah Frekuensi lelang 1.002x	

b. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Capaian deviasi data PNBP fungsional DJKN tahun 2022 adalah sebesar 0,46% dari target yang sebesar 10%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17. Capaian IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Uraian	Realisasi	Kinerja
Deviasi data PNBP lelang	0.91%	195,45%
Deviasi data PNBP Piutang Negara	0%	
Rata-rata deviasi data PNBP Fungsional DJKN	0,46%	

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa deviasi data PNBP fungsional DJKN tahun 2022 pada KPKNL Yogyakarta tidak signifikan.

7. Edukasi yang Efektif

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga *output* yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

- a. Edukasi *internal* dari atasan/unit *superintenden* kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
- b. Edukasi *eksternal* dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan *feedback* yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Dalam upaya memperkuat implementasi kebijakan diperlukan ada upaya peningkatan pemahaman masyarakat akan fungsi KPKNL. Bentuk peningkatan pemahaman masyarakat dapat dilakukan melalui komunikasi dan edukasi yang dilakukan secara efektif dan komprehensif.

Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi satu IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.18.

Tabel 3.18 Capaian IKU pada sasaran strategis Edukasi yang efektif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1 Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	90	96,62	107,36%

a. Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan.

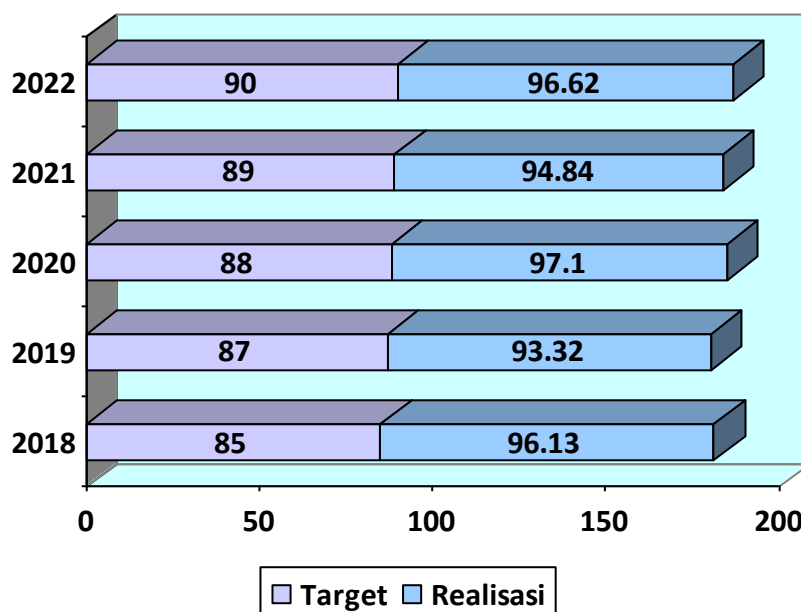
Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut: 1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta, 2) kualitas materi (bobot 15%), 3) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan 4) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Kuesioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dapat diunduh pada tautan: http://bit.ly/FormatKuesioner_KertasKerjaReviu (Tersedia kuesioner Bimbingan Teknis secara *Offline* dan *Online*).

Berikut grafik perbandingan realisasi dan target IKU edukasi dan komunikasi dari tahun 2018-2022.

Grafik. 3.5. Perbandingan realisasi dan target IKU edukasi dan komunikasi dari tahun 2018-2022



Skor rata-rata indeks tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi sampai dengan triwulan IV 2022 sebesar 96,42, dengan rincian sbb:

- Efektivitas edukasi dan komunikasi yang menjadi tupoksi Seksi PN 96,73

- Efektivitas edukasi dan komunikasi yang menjadi tupoksi Seksi Penilaian 95,56
- Efektivitas edukasi dan komunikasi yang menjadi tupoksi Seksi PKN 97,56

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan edukasi dan komunikasi adalah sebagian peserta mengeluhkan koneksi internet yang kurang baik sehingga mengurangi pemahaman atas materi yang sedang disampaikan.

Tindakan yang telah dilakukan KPKNL Yogyakarta dalam pemenuhan IKU tingkat edukasi dan komunikasi di antaranya adalah melakukan sosialisasi secara daring, meningkatkan ketersediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan sosialisasi, menggunakan perangkat video/suara yang baik pada saat pelaksanaan sosialisasi, Melakukan evaluasi hasil survei edukasi dan komunikasi pada setiap sosialisasi.

Rencana aksi berikutnya KPKNL Yogyakarta akan melakukan peningkatan kualitas edukasi melalui FGD/sosialisasi serta mengefektifkan koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder*.

8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.

Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Pengendalian dilaksanakan apabila dalam pengawasan ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan maka segera diambil tindakan koreksi.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dapat efektif apabila dilaksanakan secara terus menerus untuk memastikan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi satu IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.18.

Tabel 3.19. Capaian IKU pada Sasaran Strategis pengawasan dan pengendalian mutu yang efektif

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	95,90%	112.83%

a. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

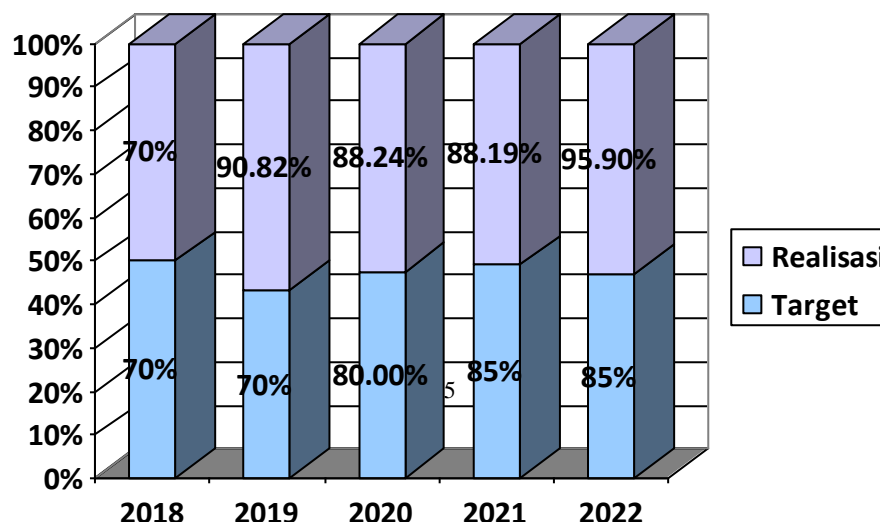
Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi seperti: surat perjanjian, SSBP, berita Acara serah terima, risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang, keputusan penetapan status penggunaan.

Selama Tahun 2022 jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan KPKNL Yogyakarta telah ditindaklanjuti sebanyak 239 dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L sebanyak 63.
- Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L sebanyak 54.
- Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021 sebanyak 66.
- Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2022 sebanyak 56.

Berikut perbandingan target dan realisasi persentase tindak lanjut pengelolaan aset

Grafik 3.6. Perbandingan target dan realisasi Persentase tindak lanjut pengelolaan Aset 2018-2022.



9. SDM yang Kompeten

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi satu IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.20.

Tabel 3.20 Capaian IKU pada Sasaran Strategis SDM yang kompeten

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%

a. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU persentase pengembangan kompetensi ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP).1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan *training* berdasarkan kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Untuk tahun 2022 pegawai KPKNL Yogyakarta yang telah melebihi kriteria sebanyak 50 pegawai dari 50 pegawai yang memenuhi kriteria, artinya seluruh pegawai KPKNL Yogyakarta telah memenuhi standar kompetensi teknis dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan IKU ini adalah dengan melakukan monitoring penyelesaian *e-learning* dan Pelatihan Jarak Jauh serta keikutsertaan pegawai dalam webinar.

Action plan berikutnya antara lain akan mengikuti program pengembangan pada tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN dan terus melakukan monitoring pelaksanaan *e-learning* dan Pelatihan Jarak Jauh.

8. Organisasi yang *Fit for Purpose*

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi dua IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.21.

Tabel 3.21 Capaian IKU pada Sasaran Strategis organisasi yang *fit for purpose*

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	80	96,84	121,05%
2	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	99,36	110,40%

a. Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja

IKU ini untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana tabel berikut:

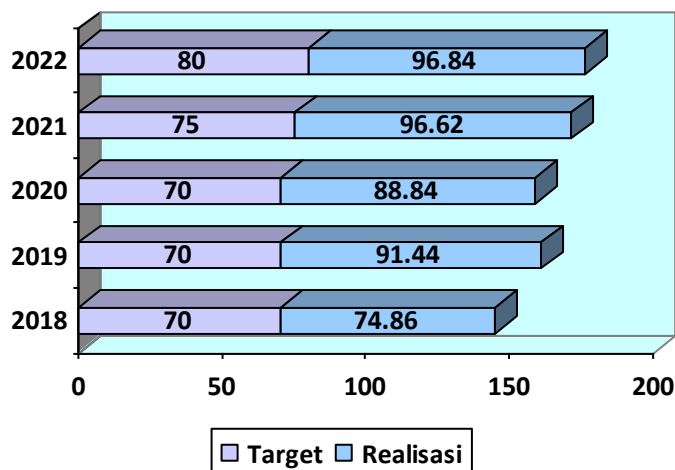
Tabel 3.22. Bobot Komponen Review Pengelolaan Kinerja

No.	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
2	Pelaksanaan/eksekusi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
3	Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	15%

Proses penilaian tingkat kantor wilayah dilakukan oleh MKO Kantor Pusat DJKN. Sedangkan tingkat KPKNL dilakukan penilaian oleh tingkat Kanwil (SMKO). MKO akan melakukan verifikasi secara *sampling* terhadap hasil penilaian Kanwil kepada KPKNL.

Target nilai hasil rewiu kinerja berbasis BSC yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 80. Berdasarkan hasil rewiu dari Kanwil DJKN Jawa tengah dan DIY, KPKNL Yogyakarta memperoleh nilai 96,84. Artinya KPKNL Yogyakarta telah mengelola kinerja dengan sangat baik. Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2018 dan 2022.

Grafik 3.7. Perbandingan target dan realisasi nilai hasil review pengelolaan kinerja tahun 2018-2022



Tindakan KPKNL Yogyakarta untuk mencapai IKU ini adalah dengan melakukan penatausahaan dan pengelolaan data/dokumentasi pengelolaan kinerja baik perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring maupun evaluasi oleh Mitra Manajer Kinerja Organisasi (MMKO). Adapun rencana aksi selanjutnya adalah melakukan penatausahaan data pengelolaan kinerja dengan lebih rapi lagi, baik

untuk kegiatan yang dilakukan secara daring maupun tidak, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap monitoring dan evaluasi. Diharapkan dengan pengelolaan kinerja yang baik dapat meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan KPKNL Yogyakarta serta dapat menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

b. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan *feedback* peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen.

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu:

- 1) Kecepatan (seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD).
- 2) *Feedback* peserta yang terdiri dari *content*, *delivery*, dan *contribution*.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) Data pelaksanaan FGD yang ada di *e-performance* masing-masing Pejabat Administrator, dan
- 2) Kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Aspek yang diukur dengan kuesioner (*feedback*) dari peserta (bawahan) yaitu:

- 1) *Content* (topik materi dan pesan yang disampaikan);
- 2) *Delivery* (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator);
- 3) *Contribution* (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai).

FGD Triwulan I s.d. IV Tahun 2022 telah dilaksanakan dan data pelaksanaan FGD dimaksud telah diunggah pada aplikasi *e-performance*. Dari

aspek kecepatan, FGD Pejabat Administrator dilaksanakan maksimal 3 hari setelah preliminary FGD oleh Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

FGD Pejabat Administrator Tahun 2022 pada KPKNL Yogyakarta telah terselenggara empat kali yaitu:

- Triwulan I dengan tema “Penguatan Integritas dan Keamanan Informasi”.
- Triwulan II dengan Tema “Kemenkeu Menuju Normal Baru”.
- Triwulan II dengan tema “Cintai Negeri, Kelola Keuangan Pribadi”
- Triwulan IV dengan tema ‘Penguatan Budaya Kemenkeu Mendukung Layanan Digital dan Penerimaan Optimal”

Indeks capaian hasil pengukuran efektivitas FGD Pejabat Administrator Tahun 2022 yang diperoleh KPKNL Yogyakarta adalah sebesar 99,36 dari target yang ditetapkan sebesar 90. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, FGD Pejabat Administrator yang dilaksanakan KPKNL Yogyakarta berjalan sangat efektif.

10. Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi dua IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.23.

Tabel 3.23. Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan yang optimal

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,41%	99,91%
2	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	100%	100%

a. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.

Adapun realisasi IKU ini 95,41% dari target sebesar 95.5% sehingga capaiannya sebesar 99,91%.

Belum optimalnya capaian IKU disebabkan oleh rumusan perhitungan SMART DJA yang memperhitungkan komponen efisiensi menjadikan posisi satker dilematis karena terdapat beberapa kegiatan yang membutuhkan anggaran dengan maksimal sehingga tidak dapat dilakukan efisiensi pada kegiatan tersebut.

Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi hasil review pengelolaan kinerja tahun 2020 s.d.2022.

Tabel 3.24. Perbandingan target dan realisasi nilai hasil review pengelolaan kinerja tahun 2020-2022

2020		2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
95%	99.98%	95,5%	93,77%	95,5	99,91%

Tindakan yang telah dilakukan untuk pencapaian kualitas pelaksanaan anggaran antara lain dengan monitoring realisasi POK, koordinasi dengan UIC, berkoordinasi dengan satker GKN Yogyakarta dan KPPN Yogyakarta.

Action plan berikutnya antara lain akan memastikan seluruh seksi di lingkup KPKNL Yogyakarta melakukan monitoring secara berkala dan akurat terhadap implementasi penggunaan anggaran serta mendorong setiap seksi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN

dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

1. Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN, yang diukur dari:
 - a. Dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA),
 - b. Persentase Validitas dan Completeness Master Aset
2. Dukungan Tingkat Kualitas Pengadaan yang berfokus pada dukungan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan. Indeks tata kelola pengadaan (ITKP) merupakan Indeks yang diukur oleh LKPP yang terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan.

Adapun realisasi IKU ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Hal ini dapat dimaknai bahwa kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan pengadaan pada KPKNL Yogyakarta telah berjalan dengan baik.

KINERJA LAINNYA

Selain 19 (sembilan belas) IKU yang ditetapkan oleh KPKNL Yogyakarta dengan capaian sebagaimana diuraikan di atas, KPKNL Yogyakarta juga melakukan kegiatan yang tak kalah pentingnya terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Yogyakarta. Kinerja lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip

Pada tahun 2022, KPKNL Yogyakarta meraih gelar Juara pertama dalam Lomba Pengelolaan Arsip Unit Vertikal DJKN. Prestasi ini diraih atas kemampuan KPKNL Yogyakarta dalam mengelola arsip sesuai dengan tata cara pengarsipan yang telah ditentukan. Pencapaian ini menunjukkan bahwa budaya sadar dan tertib arsip telah tumbuh di lingkungan KPKNL Yogyakarta.

Dalam mengelola arsip, KPKNL Yogyakarta melibatkan semua pegawai untuk berpartisipasi. Penganjangan “GEMATI” atau Gerakan Menata Arsip dengan Hati menjadi awal pembenahan arsip pada KPKNL Yogyakarta. “GEMATI” merupakan kegiatan pemberkasan arsip yang dilakukan rutin setiap hari Jumat yang dilakukan secara bersama-sama oleh semua pegawai KPKNL Yogyakarta.

Kegiatan pemberkasan meliputi pemeriksaan, penentuan indeks, penentuan kode klasifikasi, pelabelan, pembuatan daftar arsip, dan penyimpanan.

2. Optimalisasi BMN

Pada tahun 2022 KPKNL Yogyakarta selaku pengelola barang telah menerbitkan izin perpanjangan waktu atas pemanfaatan BMN melalui mekanisme pinjam pakai terhadap 2 (dua) unit BMN yang dikuasi oleh Kanwil Kemenag DIY yang dipinjamkan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman untuk dipakai sebagai tempat perawatan penderita covid-19 mulai dari Januari hingga Juni 2023. Kegiatan ini merupakan optimalisasi aset negara untuk penanganan covid-19, dan dengan sinergi seluruh unsur masyarakat diharapkan dapat mempercepat penanggulangan covid-19.

KPKNL Yogyakarta juga telah menerbitkan persetujuan alih status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada Badan Pusat Statistik kepada badan Pengawas Pemilihan Umum.

3. Lelang Terjadwal Khusus

Dalam upaya memasyarakatkan lelang non eksekusi sukarela, KPKNL Yogyakarta juga mengadakan lelang terjadwal khusus yang dikenal sebagai "Lelang Kamisan". Lelang Kamisan adalah lelang yang dilaksanakan setiap hari Kamis pada minggu kedua setiap bulannya.

Sejalan dengan program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Lelang Kamisan merupakan inovasi KPKNL Yogyakarta yang menjadi program unggulan dalam membantu UMKM untuk memasarkan dan menjual produknya melalui mekanisme lelang yang dipandu oleh KPKNL Yogyakarta. Pelaksanaan Lelang ini sesuai dengan PMK No.213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang memberikan kemudahan dan penyederhanaan proses bisnis lelang sehingga lebih diminati masyarakat.

4. *Crash Program* Keringanan Utang

Crash Program Keringanan Utang merupakan program percepatan penyelesaian Piutang Negara dan/atau pemberian insentif yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum. Keringanan utang yang dimaksud adalah pengurangan pokok, bunga, denda, ongkos/biaya atau beban lain.

Crash Program Keringanan Utang dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022 tentang Penyelesaian Piutang Instansi

Pemerintah yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2022.

Melalui *crash program* keringanan utang ini KPKNL Yogyakarta berhasil menurunkan *outstanding* sebanyak 98 BKPN senilai Rp862.736.095,76.

5. Kehumasan

Kehumasan menjadi bagian penting bagi suatu organisasi sebagai upaya komunikasi publik dengan para pemangku layanan atas layanan yang diberikan. Sebagai instansi pemerintahan yang membutuhkan sarana/fasilitas untuk menyampaikan layanan-layanan sesuai tugas fungsi KPKNL Yogyakarta yang dapat digunakan oleh masyarakat, kehumasan menjadi jembatannya.

Bentuk kehumasan yang dilakukan oleh KPKNL Yogyakarta, yaitu pengelolaan media sosial, penulisan berita liputan/artikel, penyusunan profil kantor, hubungan media massa, penyampaian informasi lewat iklan radio/surat kabar/situs internet, dan lainnya.

Berbagai bentuk kehumasan tersebut senantiasa dilaksanakan sebagai upaya menjaga citra baik dan reputasi KPKNL Yogyakarta dan memberikan dampak positif serta manfaat bagi masyarakat secara umum.

Dalam rangka mengenalkan tugas dan fungsi kepada masyarakat khususnya kepada dunia Pendidikan, KPKNL Yogyakarta telah menggelar "Visit KPKNL Yogyakarta 2022" dengan mengundang civitas academia Manajemen dan Penilaian Properti, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM).

6. Perbaikan Pelayanan

Pandemi dapat menjadi pemantik dan penyemangat bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat. Saat ini masyarakat semakin menuntut lebih atas pelayanan yang diberikan dan senantiasa mengawasi, meluruskan dan mendorong laju organisasi.

Transformasi digital lebih luas tidak hanya dari merubah layanan menjadi *online* namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan "nilai" yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Tantangan pelayanan publik yang dihadapi saat ini semakin berat dan kompleks serta ditambah dengan adanya pandemi Covid-19. Perlu adanya kebijakan-kebijakan terobosan dan inovatif dalam rangka mengatasi permasalahan dengan tetap berorientasi kepada pelayanan publik terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Inovasi layanan KPKNL Yogyakarta di antaranya berupa *One Stop Service* yang merupakan aplikasi layanan lelang satu pintu dan Aplikasi PaiJo (Panggonan Idola Kerjo) merupakan aplikasi untuk menjaring preferensi unit kerja internal bagi pegawai KPKNL Yogyakarta.

Beberapa hal yang telah dilakukan KPKNL Yogyakarta terkait pelayanan di masa pandemi covid-19 adalah: implementasi *flexible working space* dengan memberlakukan *Work From Home*, mengubah beberapa layanan menjadi layanan *online*, mempublikasikan perubahan layanan melalui media sosial, serta menyiapkan sarana layanan yang memenuhi protokol kesehatan.

REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per-31 Desember 2022 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 untuk belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai adalah sebesar Rp1.357.832.839,- atau 93,62% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp1.450.428.000,-. Realisasi per-jenis belanja KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 3.25.

Tabel 3.25 Realisasi per jenis belanja KPKNL Yogyakarta Tahun anggaran 2022

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Penyerapan
Belanja Pegawai	0	0	-
Belanja Barang	Rp1.450.428.000	Rp1.357.832.839	93,62%
Belanja Modal	0	0	-
TOTAL	Rp1.450.428.000	Rp1.357.832.839	93,62%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Yogyakarta selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Sebagai pengelola kekayaan negara, dan lelang, KPKNL Yogyakarta telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi yang sangat fluktuatif, tugas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan. Terlebih pada era *new normal* ini, meskipun dalam kondisi pandemi namun pelayanan KPKNL Yogyakarta tidak kendor, pandemi covid-19 tidak menjadi alasan keterbatasan dalam pelayanan publik. Seluruh jajaran KPKNL Yogyakarta senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan. Hal ini tampak pada pencapaian Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Yogyakarta tahun 2022 sebesar 114,98%.

Langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan KPKNL Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan, antara lain:

1. Meningkatkan penerimaan PNBP dari hasil pengelolaan Aset melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, PNBP lelang dan PNBP pengurusan piutang
2. Memastikan aset yang dikelola oleh KPKNL Yogyakarta aman secara fisik, administrasi, dan hukum
3. Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN pada Satker.
4. Mengoptimalkan pengurusan piutang negara.
5. Melakukan inovasi dan mengembangkan lelang.
6. Meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder* dengan mengembangkan berbagai inovasi yang memberikan kemudahan layanan dan meningkatkan kinerja organisasi.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Yogyakarta, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Dalam lingkup internal, Laporan Kinerja

tersebut harus menjadi pelecut semangat untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam lingkup eksternal, Laporan Kinerja menjadi media pengenalan kepada *stakeholders* sehingga diharapkan peran KPKNL Yogyakarta dapat semakin dirasakan oleh masyarakat melalui pemberian layanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (15.244.007.000)	177,72% (27.092.400.680)	177,72
		Persentase produktivitas lelang	36%	57,14%	158,73
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	100% (180.000.000.000)	93,56% (168.410.792.806)	93,56
		Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100 (1.250.000.000)	263,71 (3.296.325.170)	263,71
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,35	4,67	107,36
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	74,39%	119,98
		Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100% (508)	126,57% (643)	126,57
		Persentase Penyelesaian BKPN	100% (156)	137,18 (214)	137,18
		Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	112,08%	112,08
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	0%	200
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100%	108,7
		Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN:	10%	0,46%	195,45
7	Edukasi yang efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90	96,62	107,36

8	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	85%	95,90%	112,83
9	SDM yang kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120
10	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	80	96,84	121,05
		Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD	90	99,36	110,40
11	Pengelolaan keuangan yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,41%	99,9%
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	100,00%	100,00
Nilai Kinerja Organisasi					114,98

Jumlah Anggaran Tahun 2022

: Rp1.450.428.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2022

: Rp1.357.832.839,00

KALENDER PERISTIWA TAHUN 2022

KPKNL Yogyakarta

13 Januari 2022

Direktur PNKNL: Disiplin & Militan Dalam Berinovasi



Yogyakarta - Disiplin, Kreatif, Inovatif, dan Militan itulah mentalitas positif yang ditekankan dalam pengarahannya oleh Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain (PNKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lukman Effendi saat kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta Kamis, (13/1) lalu,

Bertempat di wajah baru Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta yakni Ruang Area Pelayanan Terpadu yang baru selesai direnovasi, pengarahannya yang dibungkus dalam bincang santai ini dibuka oleh sambutan hangat dan renyah dari Marhaeni Rumiasih selaku Kepala Kantor.

Dalam pengarahannya yang diberikan, pria yang memiliki masa kerja selama 40 tahun ini berbagi banyak pengalaman dan

tips kerja keras dengan strategi serta prinsip yang kuat. "Jadilah pribadi yang multitasking, kuasai banyak hal, jangan lelah untuk terus belajar dan kembangkan potensi diri," demikian pesannya.

Sumber: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-berita/26899/Direktur-PNKNL-Disiplin-Militan-Dalam-Berinovasi.html>

24 Januari 2022

KPKNL Yogyakarta Siap Sukseskan Program Sertifikasi BMN Dengan Status BBSK Tahun 2022



Yogyakarta - Rabu (26/1) lalu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta menggelar rapat koordinasi Persiapan Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) untuk status Bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK) Tahun 2022 kepada 31 (tiga puluh satu) satuan kerja di wilayah Provinsi D.I.Y.

Kepala KPKNL Yogyakarta Marhaeni Rumiasih membuka acara dan menyampaikan hal-hal seputar ketentuan pensertipikatan, yaitu pada Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengamanahkan Barang Milik Negara/Daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Sumber: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-berita/27041/KPKNL-Yogyakarta-Siap-Sukseskan-Program-Sertifikasi-BMN-Dengan-Status-BBSK-Tahun-2022.html>

27 Januari 2022

Kunker ke KPKNL Yogyakarta, Direktur Lelang Ajak Seluruh Penggawa Beradaptasi dan Kembangkan Potensi Diri



Yogyakarta – Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Joko Prihanto bersama Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Mahmudsyah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta pada Kamis, (27/1) di sela-sela Kegiatan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sinergis bersama Bank BRI dan Kanwil ATR/BPN DIY yang dihelat di Yogyakarta.

Direktur Lelang menyampaikan agar seluruh penggawa siap dengan perubahan yang begitu cepat dan kadang tidak tertebak akan mengarah kemana. “Teknologi Informasi berkembang dengan sangat cepat dan diikuti oleh perkembangan berbagai bidang lain sehingga semua harus siap beradaptasi,” ujar pria kelahiran Purwokerto 58 tahun silam ini.

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpnl-yogyakarta/baca-berita/27048/Kunker-ke-KPKNL-Yogyakarta-Direktur-Lelang-Ajak-Seluruh-Penggawa-Beradaptasi-dan-Kembangkan-Potensi-Diri.html>

28 Januari 2022

KPKNL Yogyakarta Bersinergi Perkuat ALCo Kemenkeu melalui Pemberdayaan UMKM



Yogyakarta --- Jumat (28/01), bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb Prov. DIY), telah berlangsung Rapat Koordinasi Assets and Liabilities Committee (ALCo) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Regional Yogyakarta. Rakor dihadiri oleh Kepala Kantor Unit Vertikal Kemenkeu di Provinsi DIY atau yang mewakili. KPKNL Yogyakarta dalam kegiatan ini berkesempatan memaparkan terkait Kontribusi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) dan Pemberdayaan UMKM.

Kepala KPKNL Yogyakarta Marhaeni Rumiasih memaparkan mengenai Realisasi PNBP Tahun 2021, Proyeksi PNBP Tahun 2022, Optimalisasi Barang Milik Negara (BMN), dan Pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM sendiri dilakukan dengan komprehensif melalui tiga program unggulan yakni Kedai Lelang UMKM, Crash Program Keringanan Utang, dan Pemberlakuan Diskon Sewa BMN untuk penyewa yang berasal dari pelaku usaha perorangan berskala ultra mikro, mikro, dan kecil.

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpnl-yogyakarta/baca-berita/27062/KPKNL-Yogyakarta-Bersinergi-Perkuat-ALCo-Kemenkeu-melalui-Pemberdayaan-UMKM.html>

9 Maret 2022

Kunjungi Yogyakarta, Dirjen Kekayaan Negara: Lakukan Pekerjaan dengan Baik agar Eksistensi DJKN Terjaga!



Yogyakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Rionald Silaban dan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Dedy Syarif Usman menyempatkan waktu melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta pada Rabu, (9/3) di Ruang Prambanan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.

Para Penggawa KPKNL Yogyakarta beserta jajaran berkumpul untuk mendengarkan arahan dan motivasi dari orang nomor satu di DJKN tersebut. Pada kesempatan ini Rio sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa para penggawa KPKNL Yogyakarta harus melakukan pekerjaan dengan baik agar eksistensi DJKN tetap terjaga. "Semoga semua diberi kekuatan untuk dapat memanggul amanah ini (tugas di DJKN) dan yakin

apa yang kalian lakukan," ujar Rio.

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-berita/27525/Kunjungi-Yogyakarta-Dirjen-Kekayaan-Negara-Lakukan-Pekerjaan-dengan-Baik-agar-Eksistensi-DJKN-Terjaga.html>

18 Maret 2022

KPKNL Yogyakarta Selenggarakan Sosialisasi Gebyar Lelang UMKM dan Kedai UMKM



Yogyakarta --- Pada Jumat (18/03) lalu, dilaksanakan Sosialisasi Gebyar Lelang Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kedai UMKM secara daring, berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Yogyakarta. Dibuka dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya, seluruh peserta yang terlibat yaitu para pelaku UMKM, penggawa KPKNL Yogyakarta serta Pegawai OJK Wilayah Yogyakarta mengikuti acara dengan antusias.

Pada kesempatan ini, Kepala KPKNL Yogyakarta Marhaeni Rumiasih memberikan sambutan dan mengenalkan mengenai lelang UMKM. Heni, sapaan akrabnya mengutarakan bahwa pandemi COVID 19 ini berimbas pada perubahan mindset terhadap seluruh aspek kehidupan termasuk cara orang

bertransaksi.

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-berita/27647/KPKNL-Yogyakarta-Selenggarakan-Sosialisasi-Gebyar-Lelang-UMKM-dan-Kedai-UMKM.html>

27 Maret 2022

Direktur Utama BLU LMAN Kunjungi KPKNL Yogyakarta



Yogyakarta – Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta Marhaeni Rumiasih menyambut kunjungan kerja Direktur Utama Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi pada Rabu (27/3) lalu, bertempat di Ruang Santai Cafe KPKNL Yogyakarta. Kunjungan tersebut dilakukan pasca pelaksanaan ground breaking ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 km, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Bounding pada BLU LMAN sudah diterapkan sejak awal pembentukannya, kata Basuki. Dengan komposisi sumber daya manusia yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan NonASN, BLU LMAN memadukan kedua hal tersebut dengan baik, dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku. “Lebih penting dalam bekerja itu adalah keikhlasan,” tambah Basuki.

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-berita/27904/Direktur-Utama-BLU-LMAN-Kunjungi-KPKNL-Yogyakarta.html>

13 April 2022

Tantangan Baru, Kepala KPKNL Yogyakarta Melangkah Maju Jadi Bagian Keluarga Besar Setjen Kemenkeu



berbeda atau lintas unit.

Yogyakarta – Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta Marhaeni Rumiasih dilantik oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi pada Rabu (13/4) lalu secara daring, bersama 416 pejabat lainnya. Marhaeni mendapatkan amanah baru untuk menahkodai Bagian Advokasi I pada Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkeu. Pelantikan tersebut dilakukan pasca terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 403/KM.1/UP.11/2022 tentang Mutasi, Pengangkatan, dan Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagian besar dari pejabat yang dilantik tersebut merupakan pemindahan dari unit eselon I yang

berbeda atau lintas unit. Mengutip dari laman kemenkeu.go.id, pemindahan antar unit eselon I tersebut merupakan strategi pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkeu. Mutasi dan promosi menjadi ajang memperkaya kemampuan, pengetahuan, pengalaman, kepemimpinan, manajerial skill, dan kompetensi.

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-berita/28074/Tantangan-Baru-Kepala-KPKNL-Yogyakarta-Melangkah-Maju-Jadi-Bagian-Keluarga-Besar-Setjen-Kemenkeu.html>

21 Juni 2022

Dirjen Kekayaan Negara: Reputasi Keluarga Besar DJKN Ada di Pundak Kita



Yogyakarta – “Milikilah mentalitas untuk selalu menjadi solusi dan menuntaskan pekerjaan,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Rionald Silaban dalam kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta pada Selasa (21/6) lalu. Rio, sapaan akrabnya, juga menambahkan agar seluruh penggawa KPKNL Yogyakarta selalu memberikan yang terbaik dan konsisten dalam bekerja, meskipun hal tersebut tidak mudah.

Ia berpesan agar budaya kerja Kementerian Keuangan diperkuat sehingga keluarga besar DJKN, senior dan junior, bangga menjadi bagian dari insan pengelola aset negara.

Dirjen KN yang saat ini menjabat pula sebagai Ketua Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ini membagikan beberapa pengalaman bekerja lintas instansi.

“Bekerja dengan pihak-pihak yang berasal dari berbagai instansi memerlukan semangat sinergitas yang tinggi, harus mampu memberikan ruang gerak bagi semua elemen, dan pastikan integritas menjadi bekal yang utama,” ungkapnya.

instansi memerlukan semangat sinergitas yang tinggi, harus mampu memberikan ruang gerak bagi semua elemen, dan pastikan integritas menjadi bekal yang utama,” ungkapnya.

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-berita/28714/Dirjen-Kekayaan-Negara-Reputasi-Keluarga-Besar-DJKN-Ada-di-Pundak-Kita.html>

21 Juni 2022

Menkeu : Make Yourself Ready and Create Better Environment For Work



Yogyakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak seluruh pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bersiap diri dalam menghadapi berbagai tantangan dunia kedepan dengan menciptakan suasana lingkungan kerja yang lebih baik, positif, adaptif, produktif, kolaboratif, dan challenging. “Banyak tantangan kedepan. Masalah pandemi, climate change, geopolitik, kemiskinan,

pengangguran, demografi muda, infrastruktur belum terbangun semua, dan lainnya, “ungkap Menkeu dalam acara Town Hall Meeting Kemenkeu bertempat di Gedung Keuangan Negara Yogyakarta, Selasa (21/6) lalu.

Ia menambahkan bahwa pasti ada ruang untuk perbaikan, menemukan hal-hal baru, dan sebagai pimpinan harus dapat membuat environment yang terbuka untuk mengungkapkan kesalahan. “Kebesaran suatu unit bergantung pada personality pimpinan. Makin tinggi level pimpinan, harus jembar kalangane, juga jembar atine (red-luas wawasannya, luas hatinya),” ujar Menkeu.

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-berita/28719/Menkeu-Make-Yourself-Ready-and-Create-Better-Environment-For-Work.html>

5 Juli 2022

KPKNL Yogyakarta Lakukan Penilaian Barang Rampasan Negara Eks Aset Terpidana “Siskaeeee”



Kulon Progo – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta melakukan penilaian barang rampasan negara eks aset terpidana Fransiska Candra Novitasari atau yang lebih dikenal dengan “Siskaeeee” atas permintaan resmi Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo Ardi Suryanto pada Selasa (05/7). Penilaian tersebut dilakukan dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan BMN.

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-berita/28874/KPKNL-Yogyakarta-Lakukan-Penilaian-Barang-Rampasan-Negara-Eks-Aset-Terpidana-Siskaeeee.html>

7 Juli 2022

DJKN Selenggarakan Konsultasi Publik RUU Penilai di Yogyakarta



Yogyakarta - Direktorat Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengadakan Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai pada Kamis, (7/7) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan lokasi pertama dari 37 Provinsi di Indonesia di di Gedung Keuangan Negara Yogyakarta.

Untuk mendukung kegiatan ini, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta mengundang akademisi, praktisi, lembaga independent, dan instansi baik pusat maupun daerah untuk hadir dalam acara yang dikemas secara hybrid ini. Berdasarkan pantauan saat acara berlangsung, tercatat sekitar 260 peserta mengikuti kegiatan secara daring berasal dari instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, akademisi, maupun praktisi.

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-berita/28899/DJKN-Selenggarakan-Konsultasi-Publik-RUU-Penilai-di-Yogyakarta.html>

12 Juli 2022

Fungsional Penilai Pemerintah KPKNL Yogyakarta Berbagi Ilmu Penilaian Barang Sitaan dan Barang Rampasan di Rupbasan Yogyakarta



Yogyakarta – Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta Jati Wiryawan membuka Workshop Penilaian Lingkup Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Yogyakarta pada Selasa (12/7). Jati menerangkan bahwa workshop ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan memorandum of understanding (MoU)

antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara-Kementerian Keuangan dengan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang tata cara penilaian sesuai kaidah yang ada.

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-berita/28925/Fungsional-Penilai-Pemerintah-KPKNL-Yogyakarta-Berbagi-Ilmu-Penilaian-Barang-Sitaan-dan-Barang-Rampasan-di-Rupbasan-Yogyakarta.html>

23 Juli 2022

Kuliah Umum Bertema BMN, Sinergi KPKNL Yogyakarta dan Prodi MPP UGM



Yogyakarta - Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta Jati Wiryawan membuka Kuliah Umum Program Studi (Prodi) Manajemen dan Penilaian Properti (MPP) Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) Sekolah Vokasi (SV) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang digelar pada Sabtu (23/7) secara daring. Jati memberikan apresiasi atas diselenggarakannya kuliah umum berjudul "Penilaian dan Lelang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara" sebagai salah satu bentuk sinergi antara akademisi dan praktisi dalam dunia penilaian.

Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Prodi MPP UGM, Yudistira Hendra Permana, mengenalkan Prodi MPP dan apresiasi atas sinergi KPKNL Yogyakarta dalam kuliah umum, khususnya sebagai pemateri dalam tema yang

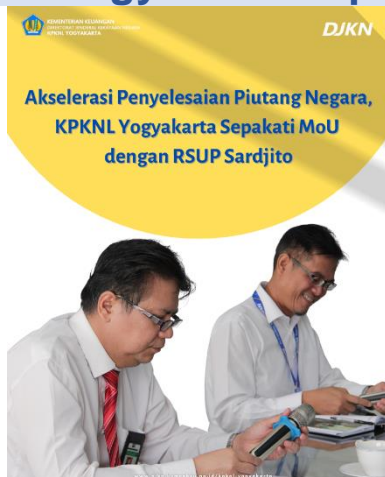
memang menjadi ranah kewenangannya yakni Pengelolaan BMN.

Pada acara inti, materi mengenai Penilaian dan Lelang dalam Pengelolaan BMN disampaikan oleh pegawai KPKNL Yogyakarta, Rakhmayani Ardhanti. Sejarah dan pengenalan instansi DJKN/KPKNL hingga mengerucut pada Penilaian dan Lelang BMN dipaparkan dan materi ditutup dengan mini tour ke laman www.lelang.go.id sembari menjelaskan bagaimana cara mengakses dan cara mendaftar sebagai peserta lelang.

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-berita/29066/Kuliah-Umum-Bertema-BMN-Sinergi-KPKNL-Yogyakarta-dan-Prodi-MPP-UGM.html>

25 Juli 2022

Akselerasi Penyelesaian Piutang Negara, KPKNL Yogyakarta Sepakati MoU dengan RSUP Dr. Sardjito



Yogyakarta - Senin (25/7) lalu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta menjadi tuan rumah pelaksanaan Sosialisasi Pengurusan Piutang Negara dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara pada Kementerian Kesehatan cq. Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta. Acara dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kepala Bidang Piutang Negara dan para Kepala KPKNL di wilayah kerja Kanwil Jateng dan D.I.Y serta Direktur Keuangan RSUP Dr. Sardjito beserta jajarannya.

Kepala KPKNL Yogyakarta Jati Wiryawan bersama Direktur RSUP Dr. Sardjito Erwin Susanto menandatangani nota kesepahaman penyelesaian 609 BKPN senilai Rp12.055.973.725,- dalam jangka waktu 3 tahun. Dalam nota kesepahaman yang sama disepakati pula rekonsiliasi data pengurusan piutang yang akan diupayakan penyelesaiannya secara optimal oleh kedua belah pihak.

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-berita/29107/Akselerasi-Penyelesaian-Piutang-Negara-KPKNL-Yogyakarta-Sepakati-MoU-dengan-RSUP-Dr-Sardjito.html>

25 Agustus 2022

Wamenkeu : Beyond Our Tusi, Bentuk Jawaban Riil Kita kepada Masyarakat



Yogyakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan pentingnya melakukan penajaman cara bekerja dengan melebihi dari sekedar tugas fungsi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat. “Masyarakat membutuhkan bentuk jawaban riil kita seperti apa, bukan sekedar tusi unit masing-masing. Ini bentuk tanggung jawab

kita dalam menjaga Republik Indonesia,” kata Wamenkeu saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Gabungan Kantor Wilayah Kemenkeu Satu dengan tema Penguatan Peran dan Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam Rangka Pengelolaan Aset pada Kamis, (25/8) di Gedung Keuangan Negara, Yogyakarta.

Wamenkeu menambahkan bahwa Kemenkeu menginginkan jajaran pimpinan tingkat regional untuk tidak ragu-ragu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kondisi perekonomian setempat, baik dari sisi penerimaan maupun belanja pemerintah.

“Pemaparan yang disampaikan dapat diwakili oleh siapa saja, baik dari Kanwil Perbendaharaan, DJP, bea cukai, DJKN, sebagai bentuk sinergi Kemenkeu. Seperti kata Ibu Menteri, pekerjaan level regional agar memunculkan connecting the dot, supaya pembicaraan makin bernas dan apa yang kita lakukan bisa lebih cepat,” ujarnya.

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-berita/29395/Wamenkeu-Beyond-Our-Tusi-Bentuk-Jawaban-Riil-Kita-kepada-Masyarakat.html>

4 Oktober 2022

FGD Pendaftaran Tanah Kesultanan dan Kadipaten, Bentuk Sinergi KPKNL Yogyakarta dan DPD MAPPI DIY



Yogyakarta -- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta bersama Dewan Pengurus Daerah (DPD) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Focuss Group Discussion (FGD) Terbatas pada Selasa (04/10). FGD tersebut mengupas tuntas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dihelat di Gedung Keuangan Negara, acara tersebut dihadiri oleh sekitar 50 (lima puluh) tamu undangan yang berasal dari unsur praktisi khususnya penilai publik dan penilai pemerintah, akademisi, instansi, serta perbankan.

Terdapat 3 (tiga) hal yang diulas oleh narasumber. Pertama, Sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah ATR/BPN DIY. Dilanjutkan dengan materi Sosialisasi Peraturan Daerah Istimewa tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan diakhiri oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi DIY Kristanti Yuni Purnawanti, yang menyampaikan mengenai Mitigasi Risiko Penilaian di DIY, khususnya terkait Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-berita/29854/FGD-Pendaftaran-Tanah-Kesultanan-dan-Kadipaten-Bentuk-Sinergi-KPKNL-Yogyakarta-dan-DPD-MAPPI-DIY.html>

20 Oktober 2022

Satgas BLBI Sita Sembilan Aset Milik PT. Sadean Intramitra Corporation di Perumahan Pesona Merapi Yogyakarta



Yogyakarta – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melakukan penyitaan atas aset dari PT. Sadean Intramitra Corporation pada Kamis (20/10), melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y). Jati Wiryawan selaku Ketua PUPN Cabang D.I.Y merangkap Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta

menjelaskan, penyitaan dilakukan atas tanah-tanah kavling di kawasan Perumahan Pesona Merapi yang berada di wilayah Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kab. Sleman, Provinsi D.I.Y.

Penyitaan tersebut dihadiri oleh Tim Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) BLBI Bareskrim Polri yang dipimpin AKBP Agus Waluyo beserta anggota tim lainnya, perwakilan aparat pemerintah daerah setempat, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dan Tim pengamanan dari jajaran Polres Kabupaten Sleman.

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-berita/30061/Satgas-BLBI-Sita-Sembilan-Aset-Milik-PT-Sadean-Intramitra-Corporation-di-Perumahan-Pesona-Merapi-Yogyakarta.html>

9 November 2022

Pertama Kali Dilakukan di Indonesia, KPK Titipkan Barang Gratifikasi ke KPKNL Yogyakarta



Yogyakarta - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta menerima penyerahan titipan barang gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada Selasa, (8/11). Penyerahan titipan gratifikasi dilakukan oleh Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI Herda Helmijaya, kepada Kepala KPKNL Yogyakarta Jati Wiryawan, dan disaksikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Bantul selaku Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan perwakilan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku pengelola Barang Milik Negara (BMN) eks gratifikasi di Ruang Rapat KPKNL Yogyakarta.

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-berita/30282/Pertama-Kali-Dilakukan-di-Indonesia-KPK-Titipkan-Barang-Gratifikasi-ke-KPKNL-Yogyakarta.html>

10 November 2022

Semarakkan HKN ke-16 DJKN, KPKNL Yogyakarta Gelar Visit KPKNL Yogyakarta 2022



Yogyakarta -- Kamis (10/11) Dalam rangka menyemarakkan Hari Kekayaan Negara ke enam belas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta menggelar "Visit KPKNL Yogyakarta 2022" dengan mengundang civitas academia Manajemen dan Penilaian Properti, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Rombongan diterima langsung oleh Kepala

KPKNL Yogyakarta Jati Wiryawan di Flexible Working Space Gedung Keuangan Negara Yogyakarta, Kamis, 10 November 2022.

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-berita/30313/Semarakkan-HKN-ke-16-DJKN-KPKNL->

Yogyakarta-Gelar-Visit-KPKNL-Yogyakarta-2022.html
22 Desember 2022

Talk Show Hari Ibu : Perempuan Berdaya Indonesia Maju



Yogyakarta – Kamis (22/12) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta turut serta dalam Talk Show Hari Ibu bertema Perempuan Berdaya Indonesia Maju bertempat di Murakabi Craft, Nanggulan, Kulon Progo. Acara yang dihelat oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan ini dilaksanakan paralel dengan expo UMKM lokal dan workshop kerajinan tangan lokal, dengan target peserta

utama yakni Komunitas Perempuan & Pelaku UMKM, Pegawai Kemenkeu, Dinas Koperasi dan UMKM, Kabupaten Sleman, Dinas Koperasi dan UMKM, Provinsi DIY, dan masyarakat umum.

Pada area Expo Kemenkeu Satu, KPKNL Yogyakarta menempati salah satu booth yang menyajikan informasi layanan khususnya lelang produk UMKM kepada para pelaku UMKM yang hadir di kegiatan peringatan hari ibu ini. Booth KPKNL Yogyakarta melayani para pengunjung yang antusias menanyakan informasi terkait lelang produk UMKM.

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-berita/30819/Talk-Show-Hari-Ibu-Perempuan-Berdaya-Indonesia-Maju.html>



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
Gedung Keuangan Negara Yogyakarta
Jl. Kusumanegara No.11, Semaki, Kec. Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166
Telp : (0274) 544091
WA : (08112958564)